



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BALATE JAYA KECAMATAN PAGUYAMAN

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN BALATE JAYA VILLAGE, PAGUYAMAN DISTRICT

Jihan Aprilia Dai^{1*}, Ismet Sulila², Romy Tantu³

¹*Universitas Negeri Gorontalo, Email: jihandai27@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: ismet.sulila@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: romy.tantu@ung.ac.id

*email koresponden: jihandai27@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i2.2689>

Abstrack

This research aims to analyze and describe the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy in Balate Jaya Village, Paguyaman District. The focus of this research is the implementation of the Family Hope Program (PKH) policy, examined from the aspects of communication, resources, disposition (implementers' attitudes), and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data sources were obtained thru in-depth interviews with village officials, PKH social assistants, and Beneficiary Families (KPM), supported by observations and documentation. The research results show that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Balate Jaya Village has generally been quite good, but not yet fully optimal. In terms of communication, information dissemination has been carried out thru group meetings and digital communication media, although there are still challenges in information accessibility for some KPM. In terms of resources, the implementation of the program still faces limitations in the number of facilitators, which affects the intensity of the assistance. Meanwhile, the disposition aspect shows that the implementers are responsive, friendly, and responsible in assisting the beneficiaries. As for the bureaucratic structure aspect, the program implementation has been supported by clear task distribution, the application of work procedures, and fairly good coordination among the implementers. The conclusion of this research shows that the implementation of the Family Hope Program in Balate Jaya Village has made a positive contribution in helping to meet the educational, health, and welfare needs of the beneficiary families. The optimization of program implementation needs to be carried out thru strengthening more adaptive communication, enhancing the capacity of implementing resources, and strengthening coordination among implementers so that the program runs more effectively and on target.

Keywords: Policy Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty Alleviation, Social Welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah



implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), Pengentasan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial.

1. PENDAHULUAN

Masalah Kemiskinan Global dan Konteks Nasional

Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan global yang paling mendalam dan kompleks di abad ke-21. Sebagai fenomena multidimensional, kemiskinan secara serius menurunkan kualitas hidup masyarakat karena menghambat pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, finansial, pangan, sandang, hingga papan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang bersifat mendasar. Kondisi ini umumnya dipicu oleh rendahnya pendapatan masyarakat akibat keterbatasan keterampilan, produktivitas yang lemah, serta sempitnya kesempatan kerja.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi persoalan serupa. Berdasarkan data BPS, di tengah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 25,90 juta jiwa. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,46 juta jiwa dibandingkan dengan September 2022, jumlah tersebut masih tergolong besar dan menjadikannya masalah sosial yang pelik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi nyata dan peran aktif pemerintah untuk melakukan langkah-langkah penanggulangan.

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)

Guna meminimalisasi permasalahan kesejahteraan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. PKH dirancang sebagai program bantuan sosial bersyarat yang berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di tingkat pusat maupun daerah.



Kebijakan ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai lintas sektor, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan institusi perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Secara hukum, kedudukan PKH juga sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mendefinisikan perlindungan sosial sebagai upaya mencegah dan menangani risiko, guncangan, serta kerentanan sosial. Tujuan utama PKH adalah memutus rantai kemiskinan dengan cara membuka dan meningkatkan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM)—khususnya ibu hamil, anak usia dini, dan anak usia sekolah—terhadap fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas pendidikan (fasdik). Saat ini, cakupan manfaat PKH juga telah diperluas ke penyandang disabilitas dan lanjut usia demi mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai amanat konstitusi. Di tingkat daerah, komitmen pengentasan kemiskinan juga diperkuat oleh regulasi lokal, seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo No. 8 Tahun 2015 yang mengatur strategi, identifikasi warga miskin, hingga fungsi monitoring dan evaluasi.

Analisis Makro: Tren Kemiskinan di Kabupaten Boalemo

Dalam konteks wilayah yang lebih spesifik, potret kemiskinan dapat dicermati melalui fluktuasi data makro di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Boalemo tahun 2025, tingkat kemiskinan di daerah tersebut dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau cenderung menurun secara konsisten:

- Tahun 2022: Garis kemiskinan berada pada angka Rp472.906 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 31,97 ribu jiwa atau setara dengan 18,74%.
- Tahun 2023: Garis kemiskinan naik menjadi Rp525.007, sementara jumlah penduduk miskin sedikit berkurang menjadi 31,94 ribu jiwa (18,38%).
- Tahun 2024: Garis kemiskinan meningkat lagi ke angka Rp551.189, namun jumlah penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 31,53 ribu jiwa, sehingga persentasenya turun ke angka 17,83%.

Meskipun secara persentase mengalami penurunan, dinamika kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan kebutuhan hidup semakin tinggi. Oleh karena itu, wilayah ini tetap membutuhkan perhatian intensif melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Analisis Mikro: Karakteristik Desa Balate Jaya

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada kenyataannya tidak tersebar merata di setiap wilayah, sehingga pemetaan yang lebih spesifik pada tingkat desa sangat diperlukan. Berdasarkan data terintegrasi dari Dinas Sosial dan Dukcapil Kabupaten Boalemo tahun 2025 mengenai jumlah penduduk prasejahtera di Kecamatan Paguyaman, ditemukan variasi tingkat kerentanan yang cukup mencolok di antara 22 desa yang ada.

Dari seluruh wilayah tersebut, Desa Balate Jaya—yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil—tercatat sebagai desa dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tertinggi di Kecamatan Paguyaman. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebanyak 766 jiwa dari total 966 jumlah



penduduk di Desa Balate Jaya dikategorikan sebagai penduduk prasejahtera. Hal ini berarti proporsi penduduk rentan di desa tersebut mencapai angka yang sangat dominan, yaitu 79,29%.

Angka persentase ini merupakan yang tertinggi dan melampaui desa-desa rentan lainnya di kecamatan yang sama, seperti Desa Bualo (74,28%), Desa Saripi (73,84%), maupun Desa Batu Kramat (68,85%). Kondisi kesejahteraan yang meluas dan berdampak pada mayoritas penduduk ini menjadikan Desa Balate Jaya sebagai wilayah yang wajib mendapatkan prioritas utama dalam penyaluran bantuan sosial. Karena jumlah penerima PKH di suatu desa berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan objektif di wilayah tersebut, maka Desa Balate Jaya menjadi lokasi yang paling representatif dan tepat untuk mengevaluasi efektivitas serta implementasi kebijakan PKH.

Evaluasi dan Kendala Implementasi Kebijakan

Secara teoritis, menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan proses krusial yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realisasi hasil kegiatan pemerintah melalui pembangunan jaringan berbagai pihak. Sementara itu, Nugroho menyatakan bahwa implementasi dapat dilakukan langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi peraturan pelaksanaan. Bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah, ia tidak akan memberikan dampak nyata bagi kehidupan bernegara jika proses eksekusinya di lapangan tidak berjalan dengan baik.

Meskipun Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan PKH di Desa Balate Jaya untuk memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, pengamatan awal menunjukkan bahwa implementasi program di lapangan belum berjalan optimal karena terbentur berbagai kendala operasional. Hambatan-hambatan tersebut dapat dianalisis menggunakan empat indikator dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III:

- a. Komunikasi: Proses penyampaian informasi antara pendamping PKH, aparat pemerintah desa, dan KPM belum berjalan optimal. Akibatnya, pemahaman penerima manfaat mengenai aturan, kewajiban, serta mekanisme formal program masih sangat terbatas.
- b. Sumber Daya: Terjadi keterbatasan yang signifikan pada aspek pelaksana, baik dari segi kuantitas (jumlah pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah KPM), kemampuan teknis operasional, hingga sarana prasarana pendukung di tingkat desa.
- c. Sikap Pelaksana (Disposisi): Muncul kendala psikologis dan motivasi akibat tingginya beban kerja yang harus ditanggung oleh para pendamping, yang kemudian memengaruhi respons serta efektivitas mereka dalam menyelesaikan keluhan atau permasalahan yang dihadapi oleh KPM.
- d. Struktur Birokrasi: Alur koordinasi interinstusional, prosedur kerja baku, serta sistem administrasi—khususnya mekanisme pemutakhiran data kemiskinan secara berkala—belum berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

Seluruh permasalahan tersebut menegaskan bahwa efektivitas PKH di tingkat desa masih memerlukan penguatan sistemis yang menyeluruh. Realitas lapangan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pelaksanaan penelitian ilmiah lebih mendalam dengan judul



“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman.”

2. METODE PENELITIAN

Lokasi, Waktu, dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balate Jaya, Kecamatan Paguyaman, selama 5 bulan (November 2025–April 2026). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Analisis berfokus pada empat faktor teori George C. Edwards III: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*key instrument*) yang terjun langsung ke lapangan.

Data, Sumber Data, dan Informan

Data penelitian bersifat deskriptif (kata-kata, tindakan, dokumen) yang dibagi menjadi:

- Data Primer: Diperoleh langsung melalui *purposive sampling* terhadap 8 informan yang terdiri dari informan kunci (Kepala Desa Hamzah Harun, Pendamping PKH Fadlian Bano), informan utama (3 orang KPM: Risna Haidari, Kebu Poriama, Hadijah Hantuma), dan informan pendukung (Kasi Kesra Yansur U. Karim, Sekdes Asni Rahim, Kadusun Rizan Pongoliu).
- Data Sekunder: Dokumen pendukung seperti DTKS, arsip, dan laporan administrasi desa.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data berlangsung selama 3–4 minggu menggunakan teknik:

- Observasi Partisipatif: Mengamati interaksi lapangan (fidelitas rendah/catatan lapangan).
- Wawancara Semi-Terstruktur: Menggali pandangan informan (fidelitas tinggi/rekaman audio).
- Dokumentasi: Foto kegiatan (fidelitas sedang) dan verifikasi dokumen sekunder.

Analisis data mengikuti model Miles (2014) yang meliputi tiga tahapan berjalan: reduksi data (pemilihan dan pengkodean informasi relevan), penyajian data (uraian naratif, matriks, dan tabel), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan menghindari subjektivitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari tiga aspek:

- Triangulasi Teknik: Membandingkan data dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen tertulis.
- Triangulasi Sumber: Mencocokkan konsistensi informasi dari sudut pandang pendamping PKH, KPM, dan aparat desa.
- Triangulasi Waktu: Melakukan pengumpulan data dan wawancara pada waktu yang berbeda untuk menguji konsistensi jawaban informan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teoretis (George C. Edward III)

Analisis implementasi kebijakan dalam laporan ini dibedah menggunakan pisau analisis teori George C. Edward III. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan eksekusi suatu program publik sangat dipengaruhi oleh empat variabel atau sub-fokus kritikal, yaitu:

1. Komunikasi: Proses transmisi, kejelasan, dan konsistensi informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran.
2. Sumber Daya: Ketersediaan staf (SDM), fasilitas fisik, informasi, wewenang, dan dukungan finansial/administratif yang memadai.
3. Disposisi (Sikap Pelaksana): Kecenderungan, komitmen, tanggung jawab, dan kepatuhan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas.
4. Struktur Birokrasi: Pengorganisasian tugas, kejelasan pembagian kerja, serta standardisasi prosedur operasi dalam birokrasi pelaksana.

Alur Transmisi dan Sosialisasi Informasi

Berdasarkan hasil temuan di Desa Balate Jaya, proses transmisi informasi mengenai PKH telah didesain secara terstruktur melalui kombinasi pendekatan konvensional dan digital. Saluran komunikasi utama dijalankan melalui Pertemuan Kelompok Rutin Bulanan yang diorganisasi oleh pendamping PKH di setiap dusun. Pertemuan ini berfungsi sebagai media tatap muka langsung untuk mentransfer informasi terkini mengenai jadwal pencairan, perubahan regulasi, dan edukasi keluarga.

Selain forum tatap muka, struktur komunikasi diperkuat oleh jaringan struktural pemerintah desa. Alur informasi mengalir secara berjenjang:

Pemerintah Desa -> Rapat Koordinasi -> Kepala Dusun -> Pendamping Kelompok -> KPM

Aparatur dusun bertindak sebagai penyambung lidah vertikal, memanfaatkan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp untuk mempercepat penyebaran pengumuman. Pemanfaatan teknologi ini terbukti memotong rantai birokrasi informasi yang lambat, sehingga dinamika kebijakan dari pusat dapat segera diketahui oleh kelompok sasaran.

2.2 Verifikasi Komitmen dan Pengawasan Kebijakan

Komunikasi dalam konteks PKH di Desa Balate Jaya tidak hanya berfungsi searah (*top-down information sharing*), melainkan bertindak sebagai instrumen pengawasan mutakhir yang disebut Verifikasi Komitmen. Pendamping PKH secara berkala membangun komunikasi lintas sektor dengan pihak Posyandu (Puskesmas) dan institusi pendidikan (sekolah).

Sebelum pertemuan kelompok bulanan digelar, pendamping melakukan pengecekan buku absensi kehadiran anak sekolah dan riwayat pemeriksaan ibu hamil/balita di Posyandu. Hasil verifikasi ini menjadi bahan evaluasi di forum bulanan. Regulasi ditegakkan secara komunikatif melalui sistem peringatan dini: jika komponen KPM melanggar komitmen kehadiran tanpa alasan logis, pendamping akan melayangkan Surat Peringatan (SP) I hingga III. Jika pengabaian kewajiban terus berlanjut, komunikasi ini bermuara pada penonaktifan kepesertaan secara permanen.



Hambatan Komunikasi Komunitas

Meskipun saluran komunikasi telah terorganisasi dengan baik, implementasi di lapangan masih membentur hambatan sosiologis dan teknis. Kendala utama bersumber dari keterbatasan akses komunikasi digital dan kondisi fisik KPM. Sebagian besar penerima manfaat dengan kategori lanjut usia (lansia) tidak memiliki perangkat *smartphone* (handphone) atau mengalami gagap teknologi. Kendala ini diperparah oleh faktor eksternal seperti fluktuasi jaringan seluler di area perdesaan.

Guna meminimalisasi asimetri informasi, pendamping PKH menerapkan strategi substitusi berupa *home visit* (kunjungan langsung ke rumah) serta mengoptimalkan pola komunikasi horizontal antar-tetangga se-dusun. Hal ini membuktikan bahwa efektivitas kebijakan di tingkat akar rumput tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem komunikasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptasi kelompok sasaran.

Manajemen Keluhan dan Aspirasi Warga Non-PPM

Faset krusial dari indikator komunikasi di Desa Balate Jaya adalah kemampuan pemerintah desa dalam memoderasi konflik sosial dengan warga non-penerima manfaat (warga miskin yang belum lolos PKH). Pemerintah desa kerap menerima protes dari masyarakat yang merasa layak namun tidak mendapat bantuan.

Menyikapi hal ini, komunikasi dijalankan secara defensif-edukatif. Kepala Desa dan Kepala Dusun memberikan pemahaman objektif bahwa otoritas penetapan KPM bukan berada di tangan desa, melainkan mutlak regulasi pemerintah pusat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemerintah desa memosisikan komunikasi sebagai kanal penampung aspirasi dengan cara memfasilitasi usulan baru masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) untuk pembaruan data berkala.

Krisis Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Temuan paling kontras dalam riset implementasi PKH di Kecamatan Paguyaman adalah terjadinya ketiadaan proporsionalitas beban kerja akibat defisit SDM Pelaksana. Secara regulasi institusional, terdapat delapan personel pendamping PKH yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Paguyaman. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pendamping dialihkan tugasnya untuk mengelola program sekolah rakyat, sehingga hanya menyisakan dua orang pendamping aktif.

Defisit ini memicu pembengkakan beban kerja (*workload distortion*):

- Rasio Ideal: 1 Pendamping : 250 KPM.
- Rasio Riil di Lapangan: 1 Pendamping : 600 hingga 900 KPM (mencakup 6 sampai 7 desa binaan sekaligus).

Merujuk pada tesis George C. Edward III, keterbatasan kuantitas SDM pelaksana ini menjadi ancaman terbesar bagi optimalisasi kebijakan, karena menurunkan intensitas pendampingan individu dan memicu potensi kelelahan kerja (*burnout*).

Dukungan Sarana dan Administrasi Desa

Guna mengompensasi kelemahan pada sektor kuantitas SDM, aspek sumber daya fasilitas dan administrasi dioptimalkan secara kolaboratif melalui intervensi Pemerintah Desa Balate Jaya. Pemerintah desa menyediakan infrastruktur fisik berupa pemanfaatan Aula Kantor



Desa sebagai episentrum pertemuan kelompok skala besar. Jika pertemuan dilakukan per dusun, aparat desa memfasilitasi penyediaan rumah warga lokal yang bersedia dijadikan tempat berkumpul.

Selain fasilitas spasial, dukungan administratif diberikan secara intensif oleh Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat bekerja sama dengan operator desa. Pemerintah desa membuka akses perangkat komputer dan jaringan internet desa guna membantu pendamping melakukan pemutakhiran data, memproses migrasi data kependudukan KPM yang bermasalah, serta mempercepat proses sinkronisasi pada aplikasi sistem jaminan sosial.

Evaluasi Relevansi dan Pemanfaatan Finansial

Dari perspektif sumber daya finansial, alokasi dana bantuan PKH yang disalurkan langsung ke rekening KPM dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap bantalan ekonomi masyarakat miskin Desa Balate Jaya. Meskipun nominal bantuan diakui belum mampu menutup seluruh biaya hidup di tengah inflasi, KPM menyatakan bantuan tersebut sangat membantu menjaga daya beli domestik.

Pola pemanfaatan dana bantuan terdeteksi berjalan sesuai koridor regulasi instruksional program:

- KPM Kategori Lansia: Dana dialokasikan penuh untuk pemenuhan gizi, kebutuhan pangan pokok sehari-hari, serta biaya penebusan obat-obatan non-BPJS.
- KPM Kategori Keluarga Muda (Memiliki Anak Sekolah): Dana bantuan diprioritaskan untuk belanja kebutuhan pendidikan, seperti seragam, alat tulis, sepatu, dan biaya transportasi operasional harian anak ke sekolah.

Disposisi: Pendekatan Humanis dan Persuasif

Variabel disposisi menekankan pada karakteristik perilaku dan kognisi pelaksana terhadap kebijakan. Di Desa Balate Jaya, pendamping PKH dan aparatur desa menunjukkan derajat komitmen dan responsivitas yang sangat tinggi. Karakter utama pelaksana tercermin dari pemilihan pendekatan humanis-edukatif ketika menghadapi kasus KPM yang abai terhadap kewajibannya.

Pelaksana secara sadar menghindari penalisasi sanksi yang bersifat represif. Jika ditemukan anak KPM yang membolos sekolah atau tidak datang ke Posyandu, pendamping tidak langsung memotong hak finansial mereka, melainkan melakukan pendekatan persuasif. Pelaksana mengutamakan konseling dan diskusi dua arah untuk mengidentifikasi akar masalah keluarga, lalu bersama-sama mencari solusi konkret. Pendekatan berbasis empati ini berhasil menumbuhkan rasa percaya (*trust*) dari masyarakat terhadap program pemerintah.

Disposisi: Komitmen, Responsivitas, dan Kerja Sama

Responsivitas pelaksana juga teruji dalam menangani kedaruratan sosial (seperti lansia sakit-sakitan). Pendamping secara proaktif mengambil alih tanggung jawab administratif dengan melakukan skema jemput bola (*home visit*) guna menyalurkan berkas informasi atau mendampingi proses pencairan dana di bank penyalur.

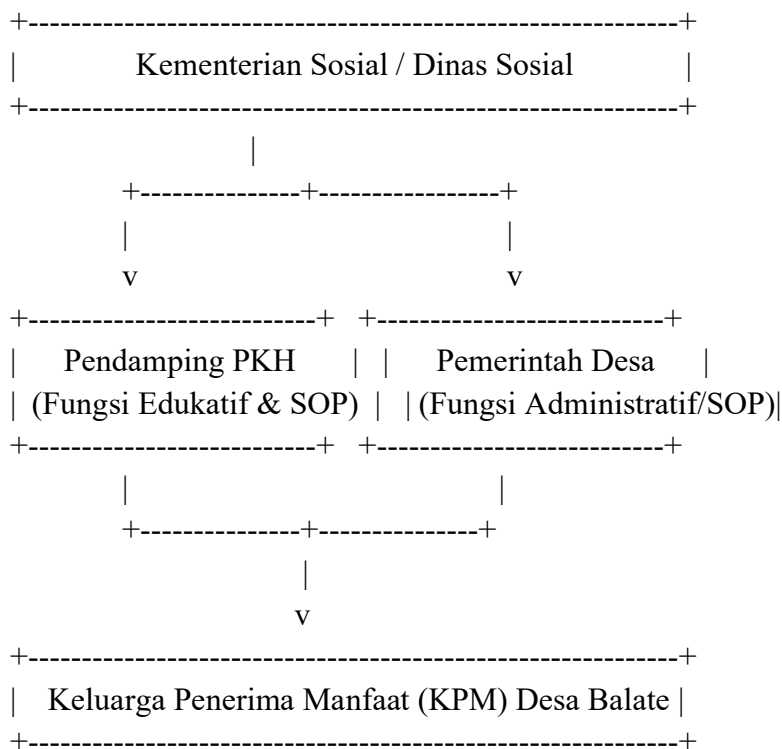
Kerja sama antara pendamping dengan jajaran struktural desa (Sekretaris Desa dan Kasi Kesra) berjalan secara dua arah dan kooperatif. Tidak ditemukan adanya ego sektoral; kedua



belah pihak secara intensif melakukan diskusi berkala di lapangan untuk mematangkan akurasi data verifikasi KPM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan objektif.

Struktur Birokrasi: Prosedur Kerja Terstandar (SOP)

Struktur birokrasi yang menopang implementasi PKH di Desa Balate Jaya didasarkan pada pembagian kerja yang jelas dan berpedoman pada Standard Operating Procedure (SOP) yang ketat dari Kementerian Sosial. Struktur ini memisahkan secara tegas fungsi sosiologis-edukatif yang diemban oleh pendamping program dengan fungsi administratif-pembinaan wilayah yang dikomandoi oleh Kepala Desa dan jajarannya.



Alur kerja birokrasi ini menjamin bahwa setiap tahapan eksekusi program—mulai dari proses validasi awal calon penerima, pemutakhiran data mutasi (kematian atau perpindahan penduduk), proses verifikasi komitmen bulanan, hingga mekanisme penyaluran bantuan—berjalan secara linier tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan (*overlapping*). Pembagian tugas yang rigid ini meminimalkan distorsi pelaksanaan di lapangan dan menjaga integritas program.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aspek komunikasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya telah berjalan cukup baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui pertemuan kelompok, koordinasi pemerintah desa, serta media komunikasi seperti WhatsApp. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan



akses komunikasi pada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti tidak memiliki telepon genggam, keterbatasan penggunaan media digital, serta ketidakhadiran dalam pertemuan rutin sehingga informasi belum diterima secara merata.

Aspek sumber daya dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum telah tersedia dan mendukung pelaksanaan program, baik dari dukungan fasilitas maupun kerja sama antara pemerintah desa dan pendamping PKH. Akan tetapi, masih terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia, khususnya jumlah pendamping PKH yang belum sebanding dengan cakupan wilayah pendampingan dan jumlah KPM yang harus dilayani, sehingga mempengaruhi intensitas pendampingan di lapangan.

Aspek disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan kondisi yang baik. Pendamping PKH memiliki sikap responsif, bertanggung jawab, serta menggunakan pendekatan humanis dalam mendampingi KPM. Pelaksana juga menunjukkan komitmen dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat penerima manfaat.

Aspek struktur birokrasi dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dengan baik melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara pendamping PKH, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Adanya koordinasi yang dilakukan secara rutin mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan.

Berdasarkan keempat aspek tersebut, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan dengan baik dan menunjukkan kesesuaian dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Namun demikian, aspek komunikasi dan sumber daya masih menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program, terutama terkait keterbatasan akses informasi pada sebagian KPM dan keterbatasan jumlah pendamping PKH. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komunikasi, penguatan sosialisasi program kepada masyarakat, serta dukungan sumber daya yang memadai agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan dapat berjalan lebih optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdal, H. (2025). Konsep kebijakan publik (Konsep, teori dan implementasi kebijakan publik).
- Abul Haris Suryo Negoro, Restu Widyo Sasongko, H. W., Desna Aromatica, Haerana, Frederikus Antonius Mana, C. V. A., & Sri Juni Woro Astuti, Marini Sari Dewi Seger, D. A. (2025). buku pengantar ilmu administrasi publik.
- Akib, H. (2022). implementasi kebijakan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Amarani, S., & Purnamasari, H. (2026). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Karawang melalui Analisis Beban Kerja Pendamping dan Sinkronisasi Data dalam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 100–115.
- Andriany, S., Kominfo, D., & Sumatera, P. (2023). Informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika. 6(September), 35–52.
- Anggraeni, A. P., & Nugroho, A. A. (2022). Evaluasi kebijakan PKH (program keluarga harapan) di Indonesia. 4(2), 39–54.
- Arifin, I. P. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan



- Kemiskinan Struktural (Telaah Teori Strukturasi Anthony Giddens). 2, 121–133.
- Author, C. (2024). Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT . BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. 4(3), 283–292.
- Badjuka, A. H. (2019). implementasi kebijakan sirba dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada badan layanan umum universitas negeri gorontalo (blu ung).
- Boalemo, B. P. S. K. (2025). balemo dalam angka 2025 (badan pusat Statistik (ed.); Vol. 23). Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo.
- Bula, T., Abdussamad, Z., & Isa, R. (2024). Evaluasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(3), 135–141.
- Caesar, M. R., Listania, T., & Undang, G. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan Struktural (Telaah Teori Strukturasi Anthony Giddens). 1.
- Cantika, M., & Susetyo, ivan budi. (2022). analisis efektivitas layanan kependudukan dengan menggunakan aplikasi alpukat betawi di kelurahan johar baru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 2(6), 618–626.
- Damanik, B. R. (2022). Fungsi Pendamping Pkh Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. 2, 249–260.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik : konsep pelaksanaan. 6(1), 83–88.
- Dunn, william n, & Pasolong. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11(1), 57–64.
- Efendi, Y. (2024). Genealogi ilmu kesejahteraan sosial pemerintah akan tetapi juga dalam lingkup swasta . Sebagai contoh layanan sosial sosial di Indonesia karena layanan sosial yang diberikan didasarkan atas unsur. 5(1), 11–23.
- Fajri, A. K., Larasati, D., & Alifkah, S. P. (2022). Vol 7, Nomor 1, Maret 2022 158. 7, 158–170.
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. 4, 17929–17938.
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., Indah, G., Nastia, P., Studi, P., Kesejahteraan, P., & Indonesia, U. P. (2025). Peran kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10, 3–10.
- Fiantika, F. R., & Maharani, A. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif (Issue April).
- Gunawan, R., Hartiadi, M., Ibrahim, A. M., & Afda, V. (2024). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat. 3, 9969–9978.
- Implementasi, M., & Publik, K. (2020). Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik. April.
- Kamariani, B. D., Fitri, N., Asbarini, E., Ridwan, A., & Chalel, A. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 5(1).



- Khoiruddin, M. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 8(2), 98–111.
- Larasati, B., & Jannah, L. M. (2022). Transfer Kebijakan dan Implementasi Program Bantuan Tunai Bersyarat (Conditional Cash Transfer/CCT) di Indonesia. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 71–90. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi>
- Lestari, R. N., Achdiani, Y., Nastia, P., Studi, P., Kesejahteraan, P., Teknik, F. P., & Indonesia, U. P. (2024). Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga. 5(September), 127–148.
- Madaliyah, M., & Rohmah, S. (2024). Upaya pengentasan kemiskinan di indonesia. 3(2), 269–273.
- Mahmud, F., & Mustari, N. (2020). Implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Kabupaten Enrekang. 6(April), 17–33.
- Melawat, S. H. (2022). Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/13213/1/buku_pengantar_administrasi_publik.pdf
- Mendrofa, R., Pembinaan, U., Indonesia, M., Publik, K., & Administrasi, T. (2024). Implementasi kebijakan publik serta terhadap kepentingan publik berdasarkan teori administrasi negara saat ini. 15(1), 387–392.
- Monica, S. D., & Laswell, H. D. (n.d.). Analisis Konsep Kebijakan Publik Bantuan Operasional Sekolah – Sri Devi Monica. 5(2), 156–166.
- Mozin, S. Y., Badjuka, A. H., Djapar, M., Abdullah, L., & Yanti, S. N. (2026). Faktor penyebab dan sejarah lahirnya studi perbandingan administrasi negara. *Jurnal Komunitas Sains*, 9(1), 579–587. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.9770>
- Muin, R. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di. 5(2), 130–147.
- Nadilla, H. F., Budiarti, M., Csr, P. S., & Masyarakat, P. (2024). Peran pendamping program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan anak stunting pada keluarga penerima manfaat. *Jurnal.Unpad.Ac.Id*, 5(1), 17–26. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>
- Nainggolan, E. (2020). *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP) Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP)*. 6(2), 89–99.
- Nurchayani, I., Aneta, A., Prihatini, F., & Tui, D. (2024). Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial di Kota Gorontalo. 1(May), 209–216.
- Nurhanifa, F. K., Studi, P., Masyarakat, P., & Barat, J. (2024). Peranan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Cijedul Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. *Jurnal Comm-Edu*, 7, 48–59.
- Pasolong, H. (2025). teori administrasi publik. *Buku Teori Administrasi Publik*, 21–28.
- Pateda, N., Sulila, I., & Isa, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dalam Program Rumah Layak Huni di Kota Gorontalo. 1(April), 148–154.
- Pratiwi, D. C. (2022). Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. 4(12), 5684–5690.



- Publik, K., William, V., & Analisis, D. (2023). DAN IMPLEMENTASI PUBLIC POLICY BY WILLIAM DUNN : ANALYSIS AND. 1(1), 1–9.
- Rahayu, H. C. (2023). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Analisis Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 5, 77–85. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Reya Lelangona, M. S., W. Ballo, F., & Molidya, A. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tagawiti Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata. COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(09), 3567–3580. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1173>
- Rodiyah, I., Si, M., Choiriyah, I. U., Ap, M., Sukmana, H., & Kp, M. (2024). Buku Ajar Kebijakan Publik.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In Umsida Press.
- Salsabilah, S., & Nugroho, L. (2023). Kajian penyaluran dan penggunaan program keluarga harapan (PKH). Jurnal Economina, 2, 1193–1202.
- Sambiran, S. (2021). Jurnal governance. 1(2), 1–9.
- Sasmito, C., Purwatiningsih, A., Publik, A., Tribhuwana, U., Malang, T., Tribhuwana, U., & Malang, T. (2023). Faktor-Faktor Keberhasilan Keluarga Penerima Manfaat untuk Mencapai Graduasi dari Program Keluarga Harapan. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2515(1), 265–275.
- Silviana, D., & Chilmy, N. W. (2024). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mencapai Graduasi Mandiri di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. 133–143.
- Sos, S. M. A., Fatmawati, S., & H, I. P. S. S. (2025). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten. 3(2).
- Sosial, D. A. N. P., & Witono, T. (2020). Pembangunan sosial, kesejahteraan sosial, dan pekerjaan sosial. XVI, 57–72.
- Studi, P., & Ilmu, M. (2021). Implementasi kebijakan pemerintahan desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kampung kubang samae desa tanon kecamatan mayor thailand selatan.
- Sulila, I. (2020). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 978–979.
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Pameungpek kabupaten. 4(1), 29–46.
- Suyasa, I. M. G., Retnosari, L., & Taufiq, N. (2024). Tepatkah Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia ? Is the Social Assistance Program Appropriate in Indonesia ' s Poverty Alleviation ? 4(1), 42–52.
- Widiastuti, I., Ap, M., Ph, D., & Gl, C. (2025). Teori Administrasi Publik.
- Zakiah, Mardianto, & Surya, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar di Kabupaten Ogan. 1(6), 73–84. <https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.15>
- Zulbay, A., Sembilanbelas, U., & Kolaka, N. (2025). PKH DI KABUPATEN MUNA. 8(2),



1090–1101.